

Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Socio-cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia

Rilus A. Kinseng^{1*)}

¹Department of Communication and Community Development, IPB University, Bogor 16680, Indonesia; CTSS-IPB University

^{*)}E-mail korespondensi: rilus@apps.ipb.ac.id

Received: March 14, 2021 | Revised: May 27, 2021 | Accepted: June 9, 2021 | Online publication: June 17, 2021

ABSTRACT

Social change and conflict are an integral part of any society, including coastal and small island communities in Indonesia. Therefore, doing research on social change and conflict in these communities is very important. As a tribute to the late Prof. Tjondronegoro, this study analyzes briefly the role of Prof. Tjondronegoro in the study of social change in rural Indonesia. This study also analyzes socio-cultural changes, especially identity and sources of the changes, and social conflict in the coastal and small island communities. This is a qualitative study, conducted by examining relevant literatures. The study shows that the late Prof. Tjondronegoro was a lecturer on social change at graduate programme of IPB who had conducted researches regarding social change. Furthermore, the study indicates that socio-cultural changes have taken place in the coastal and small island communities due to changes of fishing technology, value system, tourism, mining activities, and government policies. Meanwhile, social conflicts have also taken place, mainly those related to access to livelihood sources. Thus, it can be concluded that the late Prof. Tjondronegoro played an important role in the development of research on socio-cultural change in rural Indonesia. Moreover, the coastal and small island communities in Indonesia have undergone social changes and conflict.

Key words: *coastal, conflict, fisher, small island, social change*

ABSTRAK

Perubahan sosial dan konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap masyarakat, termasuk komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan demikian, maka kajian tentang perubahan dan konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini penting. Sebagai sebuah *tribute* untuk Prof. Tjondronegoro, tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara singkat peran Prof. Tjondronegoro dalam pengembangan ilmu dan riset perubahan sosial di pedesaan Indonesia. Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisis perubahan sosial budaya, utamanya identitas dan sumber perubahan, serta konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prof. Tjondronegoro berperan sebagai pengajar mata kuliah Perubahan Sosial di Sekolah Pascasarjana IPB dan melakukan riset-riset perubahan sosial di pedesaan. Selanjutnya, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia telah mengalami perubahan struktur sosial akibat perkembangan teknologi penangkapan, pergeseran nilai budaya, pariwisata, usaha tambang, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, konflik sosial juga terjadi pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, umumnya menyangkut akses terhadap sumber *livelihood* mereka. Disimpulkan bahwa Prof. Tjondronegoro berperan penting dalam pengembangan studi dan riset perubahan sosial pedesaan, serta telah terjadi perubahan dan konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata kunci: pesisir, konflik, nelayan, pulau-pulau kecil, perubahan sosial



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

PENDAHULUAN

Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Menurut filsuf Yunani Herakleitos, “tidak ada sesuatu pun yang tetap atau mantap ... perubahan merupakan satu-satunya kemantapan” (Bertens, 2018). Sejalan dengan itu, dalam teori perubahan sosial diyakini bahwa tidak ada satu masyarakat atau komunitas pun yang tidak berubah. Lauer (2001) mengatakan bahwa “perubahan itu normal”; sementara Dahrendorf (1973) mengatakan “*Every society is subjected at every moment to change; social change is ubiquitous*”. Pada era “*the fourth industrial revolution*” (Schwab, 2016) atau “*society 5.0*” (Salgues, 2018) ini, perubahan sosial berlangsung semakin cepat dan masif. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan apakah suatu masyarakat atau komunitas itu berubah atau tidak, melainkan seperti apa kecepatannya, ke arah mana perubahannya, unsur mana yang berubah, seperti apa *magnitude* perubahannya, apa sumber atau penyebab perubahan tersebut, serta bagaimana dampak dari perubahan sosial tersebut.

Selain membawa “kemajuan”, perubahan sosial juga menyebabkan disrupsi kehidupan dalam beragam bentuk, yang pada gilirannya dapat mengancam kehidupan umat manusia itu sendiri. Konflik sosial dalam beragam tingkat dan *magnitude* akibat perubahan struktur sosial maupun sistem nilai, sering menyebabkan korban harta dan jiwa. Contoh terkini perubahan sosial dengan *magnitude* dan dampak, termasuk dampak negatif, yang sangat besar adalah perubahan sosial yang disebabkan penyebaran Covid-19 (Zizek, 2020; Buscher et al., 2020; Kinseng, 2020 dan 2021; dan Hanafi, 2020). Oleh sebab itu, kajian mengenai perubahan sosial dan konflik semakin relevan dan penting pada masa kini.

Sebagai sebuah “*tribute*” untuk Prof. Sediono M. P. Tjondronegoro, tujuan tulisan ini pertama-tama adalah mendeskripsikan secara singkat kontribusi beliau dalam perkembangan kajian perubahan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Seperti akan diuraikan lebih lanjut di bagian berikutnya, Prof. Tjondronegoro (selanjutnya, juga disingkat Prof. Tjondro) berjasa dalam pengembangan studi-studi perubahan sosial di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengkaji perubahan sosial budaya dan konflik pada masyarakat di pedesaan, dengan fokus pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, kajian ini dapat dipandang sebagai perluasan dari kajian Prof. Tjondronegoro tentang perubahan sosial masyarakat pedesaan, yang lebih berfokus pada masyarakat petani.

Kajian terhadap komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini penting dan strategis, mengingat Indonesia merupakan negara maritim maupun negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini tentu memiliki keunikan-keunikan tersendiri dibandingkan masyarakat di wilayah ekologi lain seperti pegunungan dan sawah, misalnya. Seperti kata Satria, “karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi” (Satria, 2015). Nelayan merupakan kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dominan di wilayah pedesaan Indonesia. Sejalan dengan teori perubahan sosial tadi, maka komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia ini tentunya juga mengalami perubahan sosial budaya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, maka menarik dan penting untuk mengkaji bagaimana perubahan sosial budaya serta konflik yang terjadi pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ini.

Dalam kajian perubahan sosial, selain menganalisis identitas perubahan sosial, yakni fenomena sosial yang mengalami perubahan (Vago, 1989), faktor penyebab atau sumber perubahan sosial juga sangat penting untuk dianalisis. Pada dimensi penyebab perubahan sosial ini, paling tidak ada dua perspektif yang dominan, yaitu perspektif materialistis dan idealistis (Lauer 2001 dan Harper 1989). Seperti dikatakan oleh Harper (1989), “*Explanations fall into two general categories: those that emphasize materialistic factors (such as economic production and technology) and those that emphasize idealistic factors (such as values, ideologies, and beliefs)*”. Perspektif materialistis biasanya diasosiasikan dengan Karl Marx yang menekankan peranan teknologi dan ekonomi sebagai penyebab perubahan sosial. Melalui konsep *mode of production*, Karl Marx menekankan pentingnya peranan

¹ Indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95.181 km dan jumlah pulau sekitar 17.504 buah (Siaran Pers KKP; Nomor: SP204/SJ.04/VIII/2019).

teknologi dan ekonomi sebagai determinan perubahan sosial. Pernyataan Marx berikut misalnya, menggambarkan pentingnya teknologi sebagai sumber perubahan sosial: *“The hand-mill gives you society with the feudal lord; the steam-mill, society with the industrial capitalist”* (Wallace & Wolf, 2006). Dengan kata lain, perubahan teknologi dari yang manual ke mesin uap menyebabkan perubahan masyarakat secara mendasar, dari masyarakat feodal menjadi masyarakat industri kapitalis. Bahkan lebih “dramatis” lagi, Marx mengatakan bahwa: *“The mode of production of material life conditions the general character of the social, political and spiritual processes of life...With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed”* (Singer, 1980).

Sementara itu, perspektif idealistik menekankan pentingnya ide-ide dan sistem nilai sebagai sumber perubahan sosial. Menurut Lauer (2001), “bapak sosiologi”, yaitu Auguste Comte berpendapat bahwa sejarah manusia dapat dipandang sebagai “sejarah pemikiran manusia”. Perspektif idealistik juga diasosiasikan dengan Max Weber. Harper mengatakan: *“Perhaps the classic thinker in sociology who argued most persuasively that ideational culture can have a causative role in change was Max Weber”* (Harper, 1989). Dalam karya monumentalnya *“The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”* misalnya, Weber (1992) menjelaskan bahwa sistem nilai yang bersumber pada agama Protestan, khususnya aliran Calvinisme, merupakan faktor penting dalam melahirkan kapitalisme modern di Barat. Dalam artikel ini, kedua perspektif tersebut akan digunakan untuk menganalisis proses perubahan sosial yang terjadi pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di beberapa wilayah di Indonesia.

Perubahan sosial terkait erat dengan konflik sosial. Karl Marx misalnya mengatakan bahwa *“Without conflict, no progress: this is the law which civilization has followed to the present day”* (dikutip dalam Dahrendorf, 1963). Dengan mengatakan bahwa tanpa konflik tidak ada kemajuan, itu sama artinya dengan mengatakan bahwa tanpa konflik tidak ada perubahan sosial. Sementara Turner memformulasi proposisi Marx bahwa *“The more violent is the conflict, the greater is the amount of the structural change within a society...”* (Turner, 1998). Dahrendorf (1973) juga mengatakan bahwa konflik sosial merupakan *“the great creative force”* yang menyebabkan perubahan sosial (Vago, 1989). Sama dengan Marx, Dahrendorf berpandangan bahwa *“The more intense is the conflict, the more will be the degree of structural change and reorganization”* (Turner, 1998).

Di lain pihak, teori-teori gerakan sosial menunjukkan hubungan yang sebaliknya, yakni perubahan sosial memicu terjadinya konflik sosial. Seperti dijelaskan oleh Berberoglu (2019), salah satu faktor yang mendorong terjadinya gerakan sosial adalah melemahnya kontrol sosial dari kelas dominan. Ini sejalan dengan teori *“state breakdown”* yang dikemukakan oleh Skocpol (1989, 1994). Dalam teori *state breakdown* tersebut, Skocpol mengatakan bahwa melemahnya peran negara merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan revolusi. Sejalan dengan itu, Kinseng (2017a) mengatakan bahwa desentralisasi telah membuka peluang bagi para nelayan untuk lebih berani melakukan perlawanan secara terbuka. Dikatakan *“Since decentralisation, fishers have become more active, open, and confident about voicing their interests. Decentralisation has even promoted a social movement among fishers”* (Kinseng, 2017a). Selanjutnya, Berberoglu mengatakan bahwa *“...the central reasons that large number of masses have historically come together to express their outrage against the dominant classes and powers have been exploitation and oppression”* (Berberoglu, 2019). Kondisi struktural yang menyebabkan munculnya kelas dominan dan kelas yang didominasi itu sendiri tentunya merupakan hasil dari proses perubahan sosial.

Sejalan dengan pendapat Dahrendorf (1973) yang mengatakan *“Every society experiences at every moment social conflict, social conflict is ubiquitous”*, memang benar bahwa komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil sama sekali bukanlah sebuah komunitas yang damai, tenteram dan harmonis tanpa konflik. Oleh sebab itu, maka tulisan ini juga membahas konflik sosial yang terjadi pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, dan menganalisis kaitannya dengan perubahan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama yang disebut oleh Babbie (2016) sebagai *description*. Data mengenai kiprah Prof. Tjondronegoro di bidang perubahan sosial diperoleh dari informan, yakni beberapa orang yang pernah mendapatkan materi “Perubahan Sosial” dari Prof. Tjondronegoro ketika mereka kuliah di program studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Selain itu, data juga diperoleh dari tulisan-tulisan beliau mengenai isu tersebut. Selanjutnya, data tentang perubahan sosial budaya dan konflik pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diperoleh dari dokumen hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan baik oleh penulis sendiri maupun bersama-sama peneliti lain sebagai satu tim. Selain itu, data juga diambil dari skripsi, tesis, dan disertasi para mahasiswa bimbingan penulis. Hasil-hasil penelitian ini pertama-tama disajikan sebagai kasus-kasus, kemudian dibahas khususnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial tersebut. Demikian juga dengan konflik sosial. Analisis kaitan antara perubahan sosial dengan konflik sosial dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang telah dikemukakan di bagian pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Prof. Tjondronegoro dalam kajian perubahan sosial

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa tulisan ini merupakan *tribute* kepada almarhum Prof. Sediono M.P. Tjondronegoro sebagai seorang tokoh Sosiologi Pedesaan di Indonesia. Oleh sebab itu, kajian ini diawali dengan menjelaskan secara ringkas kiprah Prof. Tjondro terkait isu perubahan sosial dan konflik, khususnya pada masyarakat pedesaan di Indonesia.

Upaya memahami kontribusi Prof. Tjondronegoro dalam pengembangan kajian perubahan sosial di pedesaan Indonesia pertama-tama diawali dengan peranan beliau di dunia akademis, khususnya di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurut beberapa mahasiswa yang belajar Sosiologi Pedesaan di Sekolah Pascasarjana IPB di era tahun 1980-1990-an, Prof. Tjondro mengajar mata kuliah Perubahan Sosial. Salah satu mahasiswa beliau, Dr. Lala M. Kolopaking mengatakan bahwa Prof. Tjondro menggunakan beberapa buku rujukan, seperti “Memudarnya hubungan patron-klien” karya James Scott; “Memudarnya Masyarakat Tradisional” karya Daniel Lerner yang membahas perubahan sosial di Turki; buku tentang “Agent of Change”; bahan stensilan tentang “Uang” yang membahas sejarah perkembangan uang; dan buku “Land Reform” yang khusus membahas kasus-kasus *land reform* yang berhasil, misalnya di Taiwan. Persoalan *land reform* nampaknya memang mendapat perhatian besar dari Prof. Tjondro. Mahasiswa beliau yang lain, Dr. Nurmalita K. Pandjaitan misalnya, mengatakan bahwa Prof. Tjondro sering membahas tentang isu *land reform* ini dalam kuliah beliau. Sementara itu, mahasiswa beliau yang lain, Dr. Nuraini W. Prasodjo menambahkan bahwa Prof. Tjondro memberinya buku yang berjudul “Strategies of Planned Change”, yang kemudian sempat dipakainya sebagai rujukan dalam mengajar mata kuliah Perubahan Sosial di program S1 di IPB. Dengan demikian, jelas bahwa Prof. Tjondro memegang peranan penting dalam menyebarkan teori-teori perubahan sosial kepada para mahasiswa pascasarjana yang belajar di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB pada era tahun 1980-1990-an tersebut.

Dari segi karya, Prof. Tjondro tentu mempunyai kontribusi penting dalam studi-studi perubahan sosial di Indonesia. Disertasi Prof. Tjondro sendiri pada dasarnya merupakan sebuah studi tentang perubahan sosial yang terjadi di pedesaan Jawa. Dengan judul disertasi “*Social Organization and Planned Development in Rural Java*”, Prof. Tjondro membahas perubahan sosial, yang dalam teori perubahan sosial dikenal sebagai proses perubahan yang direncanakan (*planned social change*). Di dalam disertasi tersebut Prof. Tjondro antara lain mengkritisi pandangan bahwa masyarakat pedesaan Jawa itu bersifat homogen dan damai, dalam konteks pertumbuhan dan modernisasi yang tengah berlangsung. Prof. Tjondro, misalnya, menjelaskan adanya fenomena peningkatan petani yang tidak memiliki tanah (*landlessness*) di desa di Jawa Tengah. Demikian juga kehidupan demokrasi di desa,

mengalami perubahan akibat terjadinya perubahan fondasi ekonomi di desa. Dikatakan “*With the altered foundation of economic power, the principle of rural democracy were also encroached upon, and thus the tranquil democratic rural community in fact persisted as a stereotype only*” (Tjondronegoro, 1984). Dalam konteks perubahan sosial di pedesaan inilah Prof. Tjondro mengatakan bahwa bentuk kolektifitas komunitas desa yang relatif masih bertahan adalah sodality. Prof. Tjondro mengatakan “*In the continuing process of disintegration of the village community, the relatively viable social collectivities have come to be the sodalities, in the confines of which remnants of ‘primitive democracy’ are still functional and effective, particularly at hamlet and RK levels*” (Tjondronegoro, 1984).

Selanjutnya, dalam berbagai tulisan Prof. Tjondro yang lain, beliau juga membahas beragam perubahan sosial masyarakat desa. Sebagai contoh, dalam buku kumpulan tulisan Prof. Tjondro yang berjudul “Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan” (2008), pada Bab 7.1. yang diberi judul “Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa”, Prof. Tjondro mengulas tentang perubahan sosial yang disebabkan oleh introduksi teknologi pertanian di Jawa. Prof. Tjondro menjelaskan bahwa program BIMAS, yang merupakan bentuk implementasi revolusi hijau itu, mempunyai dampak yang berbeda pada petani kecil dan petani kaya. Petani kaya lebih mampu meningkatkan taraf hidupnya dalam program itu, dengan menggunakan aset baik lahan maupun finansial yang dimilikinya. Dengan aset tersebut, petani kaya mampu melakukan akumulasi penguasaan lahan, memanfaatkan kredit, bahkan melakukan ekspansi usaha ekonomi ke wilayah perkotaan. Menurut beliau, “Dengan masuknya teknologi baru di bidang pertanian sudah jelas ada lapisan-lapisan masyarakat desa yang bertambah kaya dan berkuasa atas sumberdaya.” (Tjondronegoro, 2008). Dengan kata lain, masuknya teknologi pertanian ke pedesaan telah menyebabkan terjadinya polarisasi penguasaan tanah di pedesaan. Pada Bab 7.2 dengan judul: “Penghapusan Bimas: Dari Revolusi Teknologi ke Polarisasi di Pedesaan?” masalah polarisasi masyarakat di desa akibat introduksi teknologi pertanian ini kembali dibahas. Prof. Tjondro antara lain mengatakan bahwa teknologi baru yang diintroduksi ke pedesaan “tentu akan dimanfaatkan terlebih dahulu oleh golongan-golongan kuat...” (Tjondronegoro, 2008) yang dapat menyebabkan polarisasi masyarakat desa. Oleh sebab itu, beliau memperingatkan bahwa “Tanpa juga merencanakan pentahapan industrialisasi yang jelas sehingga kelebihan tenaga kerja dari daerah pedesaan dapat diserap dan ditingkatkan kesejahteraannya, mungkin rasionalisasi di sektor pertanian akan lebih mempercepat polarisasi antar golongan petani di daerah pedesaan.” (Tjondronegoro, 2008).

Perubahan sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Sama seperti masyarakat lainnya, masyarakat pesisir itu dinamis, tidak statis. Bahkan, dibandingkan masyarakat di wilayah pedalaman, masyarakat pesisir nampaknya lebih dinamis. Hal ini dapat dipahami, mengingat masyarakat pesisir umumnya mengalami interaksi sosial dengan orang-orang dari luar komunitasnya secara jauh lebih intens dibandingkan masyarakat pedalaman. Berikut ini diuraikan perubahan sosial budaya yang terjadi di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Dalam penelitian mengenai nelayan di daerah Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, penulis menjelaskan bahwa masyarakat di Manggar mengalami perubahan yang sangat besar semenjak tahun 1980-an. Pada tahun 1970-an wilayah tersebut masih sepi, jumlah penduduk juga sedikit. Sementara itu, ketika penelitian dilakukan pada tahun 2006, daerah Manggar sudah sangat ramai. Dikatakan bahwa: “Berbagai fasilitas yang melambangkan kemodernan (*modernity*), seperti toko-toko handphone, toko sepeda motor, kios-kios yang menjual DVD/VCD, toko yang menjual kulkas dan TV, toko-toko fotocopy, dan sebagainya, cukup banyak di Manggar” (Kinseng, 2014). Pembagian kerja atau *division of labor* masyarakat di Manggar juga sudah sangat kompleks. Demikian juga dari segi etnis dan agama, penduduk Manggar juga beragam.

Selanjutnya, komunitas nelayan itu sendiri mengalami perubahan yang mendasar. Dari teknologi penangkapan, misalnya, pada sekitar tahun 1960-an para nelayan di Balikpapan hanya menggunakan dayung dan layar sebagai penggerak perahu sederhana yang disebut *soppe*. Seiring berjalannya waktu, teknologi penangkapan ini mengalami perubahan besar. Pada tahun 1970-an nelayan sudah menggunakan mesin *ketinting* sebagai penggerak, sedangkan pada tahun 1980-an *ketinting* sudah

hampir hilang, digantikan dengan mesin yang lebih besar (*inboard motor*). Seiring dengan perkembangan teknologi penangkapan, struktur sosial nelayan pun berubah, baik secara vertikal maupun secara horizontal.² Secara vertikal, nelayan terdiri dari empat kelas, yaitu buruh nelayan, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Sementara secara horizontal, nelayan terdiri atas kelompok-kelompok yang berbasis jenis alat tangkap, seperti nelayan “pejala”, “pedogol”, “perengge”, “pebagan”, nelayan pancing, dan penangkap siput/keong.

Fenomena yang serupa dijumpai juga di berbagai komunitas pesisir/perikanan lainnya di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah komunitas nelayan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Dalam tesisnya, Syahdin (2013) mengulas perubahan sosial yang terjadi pada komunitas nelayan ini. Menurut Syahdin, komunitas nelayan yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan ini mula-mula melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang serba sederhana. Mereka menggunakan perahu sederhana yang disebut *lopi* yang digerakkan dengan menggunakan dayung, sedangkan perahu yang disebut *soma* digerakkan dengan kombinasi dayung dan layar. Perahu sederhana tersebut dibuat oleh para nelayan itu sendiri. Sementara itu, alat tangkap yang digunakan adalah pancing dan jaring yang sederhana.

Akibat semakin tingginya persaingan antarnelayan, maka mulai sekitar tahun 1970-an beberapa elit nelayan mulai melakukan modernisasi armada tangkap. Proses ini semakin pesat ketika pada tahun 1980-an Pemerintah melakukan program modernisasi armada penangkapan melalui program motorisasi, termasuk pada komunitas nelayan di Kecamatan Sape. Dalam program itu, Pemerintah memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan mesin atau “motor tempel” sebagai penggerak perahu. Pada tahun 1990-an program motorisasi ini dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah. Hingga sekitar tahun 2000-an para nelayan sudah mulai menggantikan mesin tempel dengan mesin yang berkapasitas lebih besar atau kapal motor. Ukuran perahu pun semakin besar, bahkan ada yang bobotnya lebih dari 100 GT.

Perubahan perangkat teknologi penangkapan, baik ukuran perahu maupun kekuatan mesin serta jenis alat tangkap, mempunyai implikasi pada aspek sosial. Perubahan pada aspek sosial ini terjadi mulai dari jumlah tenaga kerja hingga pembagian kerja (*division of labor*), baik di internal sebuah armada tangkap maupun pada level komunitas nelayan. Dari segi jumlah tenaga kerja misalnya, pada perahu dayung (*lopi*), tenaga kerja di satu perahu hanya 1-2 orang, perahu layar (*soma*) 2-3 orang. Sementara itu, pada perahu *payang* (*jonso*) tenaga kerjanya antara 10-17 orang dan kapal motor dengan bobot kapal hingga 100 GT ke atas tenaga kerjanya juga antara 10-15 orang. Dari segi pembagian kerja, di kapal *payang* maupun kapal motor besar ada juragan, juru mudi (tekong), motoris, pengurus perahu, dan buruh nelayan. Di komunitas nelayan itu sendiri, juga ada kelompok nelayan berbasis alat tangkap, seperti nelayan *payang* (menggunakan alat tagkap jaring *payang*) dan nelayan kapal motor (menggunakan alat tangkap *mini trawl*).

Relasi antara pemilik dan tenaga kerja di perahu juga mengalami perubahan. Pada perahu mesin tempel (*sope*), misalnya, relasi itu bersifat kekeluargaan. Oleh sebab itu, pola “rekrutmennya” juga berdasarkan hubungan kekeluargaan. Sementara itu, pada perahu *payang* dan kapal motor, tenaga kerja sudah merupakan “buruh” (relasi buruh-majikan). Pola rekrutmennya juga lebih berdasarkan keahlian atau kemampuan, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan.

Kasus lain yang menunjukkan pola perubahan sosial yang serupa dijumpai pada komunitas nelayan di Juwana, Jawa Tengah. Dalam tesisnya, Situmeang et al., (2020) menunjukkan bahwa introduksi perangkat teknologi penangkapan ikan pada komunitas nelayan di Juwana menyebabkan perubahan sosial yang mendasar secara horizontal dan vertikal, baik di tingkat mikro (perahu/kapal) maupun di komunitas nelayannya. Berdasarkan waktu dan perkembangan teknologinya, Situmeang et al., (2020) membagi nelayan di Juwana menjadi tiga periode, yaitu nelayan tradisional dengan perahu tanpa mesin, nelayan tradisional dengan perahu bermesin, dan nelayan dengan kapal (bermesin).

² Merujuk pada konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh Blau (1977) dan Mouzelis (2008), Kinseng (2017b) membagi struktur sosial distribusional itu menjadi vertikal dan horizontal. Stratifikasi dan kelas sosial merupakan struktur sosial vertikal, sedangkan kelompok-kelompok sosial merupakan struktur sosial horizontal.

Pada periode perahu tanpa mesin bahkan hingga periode penggunaan perahu menggunakan mesin, tidak dikenal istilah buruh nelayan. Mereka bekerja sebagai rekan sekerja atau *co-worker*. Satu perahu digunakan secara bersama oleh dua atau tiga orang nelayan. Perubahan struktur sosial yang signifikan terjadi ketika para nelayan sudah menggunakan kapal. Di tingkat komunitas, lapisan sosial komunitas nelayan berkembang menjadi lapisan atas yang terdiri dari bos kapal, bakul ikan besar, dan pengusaha (seperti pemilik pabrik es, pemilik pindangan, pemilik pabrik ikan, pemilik mobil pengangkut dan *cold storage*); lapisan menengah yang terdiri dari antara lain nakhoda, motoris, pengurus kapal, bakul ikan yang lebih kecil, dan sebagian nelayan tradisional; serta lapisan bawah yang terdiri dari antara lain anak buah kapal (ABK), pekerja *fillet* ikan, sebagian nelayan tradisional, dan buruh angkut ikan.

Perkembangan perangkat teknologi penangkapan ini tentu juga memengaruhi struktur sosial nelayan secara horizontal. Secara horizontal, para nelayan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis alat tangkapnya. Untuk kasus nelayan di Juwana ini, seperti dijelaskan oleh Situmeang et al., (2020), pada awalnya hanya ada satu jenis alat tangkap saja sehingga struktur sosial horizontalnya tidak bervariasi. Seiring dengan perkembangan perangkat teknologi penangkapan di sana, maka pada tahun 2020 ada sekitar lima jenis alat tangkap dominan yang ada di kalangan nelayan di Juwana, yakni *purse seine*, *cantrang*, pancing, jaring cumi, dan jaring cakalang. Selain itu, muncul kelompok yang baru pula, yakni nelayan yang bekerja di kapal pengangkut. Kapal pengangkut ini berperan mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan kapal besar, terutama kapal *purse seine*, ke tempat pendaratan ikan. Dengan demikian, para nelayan kapal besar ini bisa segera melanjutkan kegiatan penangkapan, tanpa harus “membuang waktu” menurunkan ikan di tempat pendaratan ikan. Dapat dilihat bahwa kemunculan kapal pengangkut dan para pekerjanya ini merupakan dampak dari keberadaan kapal besar penangkap ikan.

Fenomena yang sama terjadi juga di kalangan para nelayan di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dalam tesisnya, Setyowati (2020) menjelaskan bahwa dengan modernisasi yang dimulai pada tahun 1980-an, maka terjadilah pelapisan sosial nelayan yang semakin kompleks. Semula para nelayan hanya menggunakan perahu kecil dengan layar dan dayung. Melalui modernisasi itu, mereka beralih menggunakan perahu yang lebih besar (kapal) dan tenaga mesin. Sejalan dengan itu, maka muncullah pelapisan sosial nelayan berbasis penguasaan alat produksi, yaitu buruh nelayan, nelayan kecil (nelayan bubu), nelayan menengah (nelayan pancing), nelayan besar (nelayan *payang* dan *purse seine*). Di kalangan para buruh nelayan pun juga muncul pelapisan sosial, seperti nakhoda, kadang ada juga wakil nakhoda, dan para pekerja atau anak buah kapal (ABK). Para anak buah kapal inilah sesungguhnya yang melakukan kerja keras penangkapan ikan selama di laut maupun mengeluarkan ikan tersebut dari palka ketika tiba dari laut. Selain itu, mereka juga bertugas membersihkan kapal, hingga melakukan persiapan perbekalan pada saat kapal akan berangkat untuk melakukan penangkapan kembali.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa sumber perubahan sosial yang terjadi pada komunitas nelayan di keempat lokasi penelitian itu adalah teknologi. Perubahan teknologi telah menyebabkan perubahan pada tiga tipe struktur sosial yang dikemukakan oleh Mouzelis (2008), yaitu struktur normatif/institusional, interaktif/figurasiional maupun distribusional. Memang teknologi merupakan salah satu sumber perubahan sosial yang sangat penting sejak lama. Seperti dijelaskan sebelumnya, perspektif materialistis menekankan pentingnya peranan teknologi dalam proses perubahan sosial, dan Marx merupakan salah satu tokoh yang menekankan peranan teknologi ini. Selain Marx, Lewis H. Morgan juga sudah menerbitkan buku yang berjudul *Ancient Society* pada tahun 1877, yang membahas tahapan perubahan sosial berdasarkan perkembangan teknologi (Vago, 1989). Di masa kini, pengkategorian era yang dilakukan oleh Schwab (2016), yakni era industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0, juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Demikian juga dengan penggolongan masyarakat menjadi *hunting society*, *agrarian society*, *industrial society*, *information society*, dan *super smart society* atau *society 5.0* yang dikemukakan oleh Salgues (2018), didasarkan pada perkembangan teknologi.

Selanjutnya, uraian beragam kasus di atas juga menunjukkan kemiripan dengan fenomena perubahan sosial komunitas pedesaan Jawa yang dikemukakan oleh Prof. Tjondro dalam beberapa tulisannya. Prof. Tjondro misalnya mencatat gejala “bertambahnya lapisan sosial” di pedesaan akibat masuknya

teknologi pertanian. Dikatakan: “Dengan bertambahnya lapisan sosial, tampaknya juga suatu lapisan menengah muncul lebih nyata, dan gejala ini memang umum sekali di negara-negara sedang berkembang yang mengalami Revolusi Hijau” (Tjondronegoro, 2008). Selanjutnya, Prof. Tjondro juga menyoroti polarisasi komunitas desa akibat masuknya teknologi pertanian dalam program revolusi hijau. Di komunitas nelayan, adopsi teknologi penangkapan yang dilakukan oleh sebagian nelayan, juga menyebabkan munculnya strata baru yang sekaligus menyebabkan terjadinya polarisasi antara para nelayan besar dengan nelayan kecil, juga antara nelayan pemilik kapal dan alat tangkap skala besar dengan para buruh nelayan.

Seperti dijelaskan di atas, perkembangan teknologi penangkapan juga menyebabkan perubahan struktur sosial nelayan secara horizontal, berupa munculnya kelompok-kelompok sosial berbasis alat tangkap yang baru. Dengan kata lain, basis kolektifitas sosial komunitas nelayan bukan pada teritorial, yaitu dukuh (*hamlet*) dan kampung (RK) seperti yang dikemukakan oleh Prof. Tjondro dalam konsep sodality. Ini nampaknya memang salah satu perbedaan antara komunitas petani dengan nelayan. Di beberapa tempat, komunitas nelayan bahkan tersegregasi menurut jenis alat tangkap. Di Balikpapan misalnya, para nelayan tinggal mengelompok dan masing-masing kelompok tersebut ditandai dengan penggunaan jenis alat tangkap tertentu (Kinseng, 2014: 61-62). Serupa dengan itu, Setyowati (2020) menjelaskan bahwa “warga Desa Paciran yang notabennya merupakan nelayan kecil dengan menggunakan alat tangkap bubu dilarang menikah dengan orang yang berasal dari daerah Weru yang nelayannya menggunakan alat tangkap mini *trawl*”. Ini merupakan akibat konflik dalam kegiatan penangkapan ikan di laut yang terjadi antara nelayan kecil dengan nelayan *trawl* tersebut. Namun nampaknya sodality memang tidak semata berbasis teritorial, tetapi merupakan kolektifitas sosial di daerah pedesaan “yang berdasarkan atas kepentingan kelompok” (Tjondronegoro, 2008:341). Selanjutnya dikatakan: “Istilah *sodality* atau *sodalis*, yang sifatnya kelompok tatap muka, akrab dan solider” dan “bukan semata-mata hubungan keluarga lagi”. Dengan demikian, kelompok sosial nelayan berbasis alat tangkap tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk sodality di kalangan komunitas nelayan. Jika Prof. Tjondro mengatakan bahwa sodality ini perlu “dibina dan dikembangkan menjadi organisasi desa yang tetap demokratis dan lebih mutakhir” (Tjondronegoro, 2008:341), maka kelompok-kelompok nelayan berbasis alat tangkap tersebut sebagian sudah berkembang ke arah itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kelompok-kelompok nelayan berbasis jenis alat tangkap cenderung menjadi “lebih formal” bahkan memiliki “kesadaran kelompok” atau “*group consciousness*” yang semakin menguat (Situmeang et al., 2019).

Tentu saja teknologi bukanlah satu-satunya sumber perubahan sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Studi Hakim (2015) misalnya, menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya perusahaan tambang di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan sosial yang besar pada komunitas di desa Sarakaman di pulau tersebut. Masuknya perusahaan tambang menyebabkan mobilitas sosial vertikal yang mengakibatkan semakin terpolarisasinya komunitas desa, dan makin sulitnya akses para nelayan pada sumberdaya perikanan. Sementara itu, Anwar et al., (2014) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Pulau Barrang Lompo, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni jalan dan pelabuhan, menyebabkan perubahan kapital sosial komunitas di pulau kecil tersebut. Dikaitkan dengan perspektif perubahan sosial, perkembangan perusahaan tambang dan pelabuhan ini termasuk dalam persepektif materialistik.

Aspek lain yang juga mengalami perubahan pada komunitas pesisir adalah institusi pengelolaan sumber daya alam atau *institutional or normative structure* istilah Mouzelis (2008). Mahmud et al., (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa mengubah zonasi perairan laut di kawasan Taman Nasional Bali Barat mempunyai dampak sosial ekonomi terhadap komunitas lokal. Hal ini sangat logis, mengingat aturan tentang zonasi wilayah laut itu memengaruhi akses komunitas terhadap sumberdaya laut tersebut. Seperti dikatakan Mahmud et al., (2015):

“Pembuatan dan perubahan zonasi berdampak pada boleh-tidaknya aktivitas tertentu dilaksanakan di kawasan konservasi, termasuk aktivitas perikanan oleh nelayan tradisional. Dengan begitu, sistem zonasi bukan hanya persoalan teknis-instrumental seperti membatasi luas wilayah laut yang ditandai mooring buoys, tapi secara sosial dan ekonomi berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi akses nelayan”.

Selanjutnya, Patriana (2017) mengkaji perubahan *Sasi* sebagai sebuah sistem pengelolaan sumberdaya perikanan di Kaimana, Papua Barat. Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan *Sasi* di Kaimana ini adalah diterapkannya sistem lelang atas sumberdaya laut yang disasi. Dalam sistem lelang ini, komoditas yang ada dalam wilayah yang disasi (*petuanan*) dijual melalui lelang. Peserta lelang adalah para pembeli atau tengkulak yang selama ini memang sudah berbisnis jual beli komoditas perikanan dengan komunitas lokal. Biasanya uang pembelian tersebut diserahkan oleh pemenang lelang sebelum buka *Sasi*. Pada dasarnya, penerapan sistem lelang ini telah mengubah status kepemilikan atas sumberdaya laut (teripang, kerang lola, batulaga, dsb) dari milik komunitas secara bersama (*communal property*) menjadi milik pribadi tengkulak (*private property*) yang memenangi lelang. Dalam sistem lelang ini, anggota fam pemilik wilayah yang disasi dan semua yang mendapat ijin untuk ikut menangkap saat buka *Sasi* harus menjual hasil tangkapannya kepada pemenang lelang. Selain itu, sistem lelang juga telah mengubah kekuasaan anggota fam atas pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam wilayah *petuanan* mereka, khususnya dalam memutuskan waktu tutup dan buka *Sasi*. Sebelum sistem lelang, warga suatu fam pemilik *petuanan* dapat meminta kepada ketua fam untuk membuka *Sasi*, ketika mereka sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, misalnya untuk keperluan berobat atau biaya pendidikan. Namun, sejak sistem lelang, keputusan untuk membuka *Sasi* didominasi oleh ketua fam bersama tengkulak.

Penerapan sistem lelang ini tidak terlepas dari bergesernya orientasi nilai budaya yang mendasari pelaksanaan *Sasi* di Pulau Adijaya, Kaimana yang menjadi lokasi penelitian Patriana ini. Menurut Patriana (2017), pada awalnya *Sasi* merupakan alat untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan media untuk memelihara kohesi sosial. Selain itu, *Sasi* juga merupakan mekanisme pemerataan kemakmuran. Dengan kata lain, *Sasi* mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. Belakangan ini pelaksanaan *Sasi* lebih didominasi oleh orientasi ekonomi dari para elit fam, yaitu upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan komoditas yang disasi. Dalam konteks itu, maka sistem lelang merupakan satu pilihan yang lebih cocok untuk dilaksanakan. Dalam sistem lelang, komoditas yang ada di wilayah *petuanan* itu dijual oleh elit fam kepada tengkulak yang berani memberi harga penawaran tertinggi dan membayar di depan (sebelum buka *Sasi*). Walaupun ada perbedaan dengan sistem lelang di Kaimana ini, sistem *Sasi* adat lelang yang dijalankan di Pulau Haruku, Maluku juga “lebih cenderung berorientasi ekonomi” (Mony, 2015). Ini sejalan dengan pendapat Prof. Tjondronegoro yang mengatakan bahwa “Gejala komersialisasi juga masuk ke masyarakat desa” (Tjondronegoro, 2008).

Bergesernya orientasi ekologis dan sosial ke ekonomi dalam pelaksanaan *Sasi* ini juga terlihat dari penggunaan teknologi penangkapan saat buka *Sasi*. Dijelaskan oleh Patriana (2017) bahwa semula kegiatan menyelam untuk menangkap biota laut saat buka *Sasi* hanya menggunakan kaca sebagai alat bantu. Belakangan ini para penyelam menggunakan kompresor sebagai alat bantu menyelam. Penggunaan alat bantu kompresor ini memungkinkan seseorang menyelam lebih lama dan di kedalaman lebih dari 20 meter. Dengan demikian, maka hasil tangkapanpun menjadi lebih banyak. Namun demikian, penggunaan kompresor ini menyebabkan terjadinya marginalisasi kaum perempuan dari kegiatan penangkapan di saat buka *Sasi*, karena yang menggunakan kompresor hanya kaum laki-laki. Jadi, yang semula perempuan mempunyai peranan yang dominan dalam kegiatan penyelaman tradisional, kini dengan penggunaan kompresor laki-lakilah yang berperan dominan.

Serupa dengan *Sasi* di Kaimana, *Sasi* di Pulau Huruku, Maluku juga mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Dalam tesisnya tentang *Sasi* laut di Pulau Haruku, Mony (2015) misalnya menjelaskan bahwa Peraturan Negeri Nomor 03 tahun 2013 telah mengubah sistem pembentukan *kewang*.³ Sebelumnya, *kewang* ditentukan (“dibentuk”) oleh pemenang lelang, sedangkan setelah diberlakukannya Peraturan Negeri tersebut, maka *kewang* dibentuk oleh pemerintahan negeri (desa). Hal ini telah memicu konflik antara *kewang* lama yang dibentuk oleh pemenang lelang dengan *kewang* baru bentukan pemerintahan negeri tersebut. Menurut Mony (2015) ada indikasi yang kuat bahwa

³ *Kewang* adalah lembaga adat yang diberi kewenangan antara lain untuk mengawasi pelaksanaan aturan adat dalam masyarakat, termasuk *Sasi* (Mony, 2015). Jadi, *kewang* berperan penting untuk memastikan aturan *Sasi* dijalankan oleh masyarakat dengan disiplin.

perubahan status *kewang* ini merupakan strategi pemerintah negeri untuk mengambil alih pengelolaan proyek pembangunan, yakni normalisasi sungai dan sarana air bersih, yang saat itu pengelolaannya dipegang oleh *kewang* yang lama bentukan pemenang lelang. Selanjutnya, Peraturan Negeri ini juga membawa perubahan lain yang cukup mendasar, yakni dari aturan-aturan *Sasi* yang semula hanya bersifat lisan berubah menjadi tertulis. Dengan kata lain, terjadi formalisasi aturan adat tentang pengelolaan sumberdaya alam, yaitu *Sasi*.

Selain itu, di masa Orde Baru, *Sasi* laut di Pulau Haruku mengalami kebangkitan atau mengalami revitalisasi. Seperti dikatan oleh Mony “Revitalisasi *kewang* adat Negeri Haruku dan pengakuan terhadap kearifan lokal tradisi *sasi* laut justru terjadi pada masa ini” (Mony, 2015). Selanjutnya dikatakan “Kelembagaan *sasi* laut Haruku direvitalisasi dan bangkit dari kehancurannya...” (Mony, 2015). Kebangkitan *Sasi* laut ini antara lain dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Kampus pada masa itu. Salah satu perubahan yang mendasar dalam proses kebangkitan *sasi* laut di Haruku ini adalah dipindahkannya otoritas pemegang *Sasi* dari gereja ke adat atau perubahan dari *Sasi* gereja menjadi *Sasi* adat.

Untuk kasus perubahan sistem pengelolaan sumberdaya alam berupa *Sasi*, baik di Kaimana maupun di Haruku ini, perubahan sosial lebih dominan disebabkan oleh aspek ideasional, yakni orientasi ekonomi. Orientasi ekonomilah yang mendorong elit adat di Kaimana mengubah sistem penjualan komoditas yang disasi menjadi sistem lelang. Bahkan penggunaan teknologi selam berupa kompresor pun didorong oleh orientasi ekonomi ini. Jadi, pada kasus ini bukan teknologi yang menjadi *driving force* perubahan sosial; sebaliknya perubahan teknologi justru disebabkan oleh perubahan pada aspek sistem nilai terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan perspektif idealistik dalam teori perubahan sosial yang diasosiasikan dengan Max Weber (perspektif Weberian), seperti disinggung sebelumnya. Namun demikian, penggunaan teknologi pada gilirannya juga menyebabkan perubahan sosial, dalam kasus di Kaimana ini termarjinalisasinya kaum perempuan dari kegiatan penangkapan di saat buka *Sasi*. Fenomena yang serupa dijumpai juga pada kasus perubahan *kewang* yang terjadi di Haruku. Perubahan sistem *kewang* dari “*kewang lelang*” ke “*kewang negeri*” juga disebabkan oleh kepentingan ekonomi. Sementara itu, perubahan dari “*Sasi gereja*” menjadi “*Sasi adat*” nampaknya juga lebih disebabkan perkembangan pada ranah sistem nilai; bukan disebabkan oleh faktor teknologi. Dalam hal ini, nampaknya pihak gereja, setelah melalui proses-proses sosial yang panjang termasuk kritik-kritik yang muncul, memandang bahwa *Sasi* yang merupakan adat turun-temurun itu, memang sudah pada tempatnya dikembalikan kepada lembaga adat.

Kasus selanjutnya adalah perubahan sosial yang terjadi pada komunitas nelayan di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kinseng et al., (2018) menjelaskan bahwa sebelum tahun 1990-an, mata pencaharian utama masyarakat di Pulau Pari adalah sebagai nelayan. Pada tahun 1990-an, usaha budidaya rumput laut berkembang dengan pesat di Pulau Pari, berawal dari introduksi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada masyarakat di Pulau Pari. Namun, usaha budidaya rumput laut ini rupanya tidak bertahan lama. Pada sekitar tahun 2008 budidaya rumput laut sudah hampir tidak ada lagi di Pulau Pari. Hal ini antara lain disebabkan kualitas air yang semakin buruk, sehingga rumput laut tidak tumbuh dengan baik.

Dengan menghilangnya budidaya rumput laut, penduduk Pulau Pari mencari alternatif mata pencaharian yang lain. Pada sekitar tahun 2010, mulailah berkembang usaha di bidang pariwisata. Sejak saat itu, kegiatan pariwisata berkembang pesat, dan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Pulau Pari. Dengan demikian, maka telah terjadi transformasi sosial “*from fishery to marine tourism*” di Pulau Pari (Kinseng et al., 2018). Di era kejayaan pariwisata ini, rumah-rumah penduduk di Pulau Pari banyak yang dijadikan sebagai *homestay*; misalnya dengan menjadikan salah satu kamar rumahnya sebagai penginapan bagi wisatawan. Berdagang beragam souvenir serta makanan dan minuman juga menjadi mata pencaharian dari banyak warga Pulau Pari, sejak pariwisata berkembang.

Dalam kasus di Pulau Pari ini dapat dilihat bahwa sumber perubahan sosial komunitas pesisir dan pulau kecil itu pertama adalah introduksi komoditas baru, yakni rumput laut, kemudian yang berikutnya adalah perkembangan pariwisata. Pariwisata memang menjadi salah satu sumber perubahan sosial yang sangat penting di berbagai komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Perkembangan

pariwisata membawa perubahan sosial budaya yang mendasar, dengan *magnitude* yang besar pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di berbagai tempat di Indonesia; seperti studi yang dilakukan oleh Pratama pada komunitas pesisir di Pangandaran (Pratama & Kinseng, 2015); Amalia (2018) pada komunitas pesisir di Pulau Merah, Desa Sumberagung, Banyuwangi; Kamilah (2019) di komunitas Pulau Tidung, DKI Jakarta; Anandhyta di komunitas pesisir Pantai Baron, DI Yogyakarta (Anandhyta dan Kinseng, 2020). Hal ini tentu tidak mengherankan, karena wilayah pesisir atau pantai dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu destinasi favorit para wisatawan di seluruh dunia. Seperti diketahui, wilayah pesisir/pantai dan pulau-pulau kecil merupakan tempat adanya pasir (*sand*), laut (*sea*), dan sinar matahari (*sun*) atau yang dikenal dengan istilah “*sun, sea, and sand tourism*” (Mendoza-González et al., 2018) yang digemari oleh para wisatawan di seluruh dunia. Dalam kaitannya dengan perspektif perubahan sosial, kedua faktor ini masuk dalam perspektif materialistik tentunya.

Konflik sosial pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Topik utama kajian Kinseng (2014) pada komunitas nelayan di Balikpapan adalah konflik sosial. Dalam kajian ini dijelaskan konflik sosial yang terjadi pada komunitas nelayan di Balikpapan, baik antar sesama nelayan (konflik internal) maupun antara nelayan dengan pihak non-nelayan (konflik eksternal). Konflik antar sesama nelayan itu sendiri juga terdiri atas dua kategori, yaitu konflik antara sesama nelayan lokal dan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar, yaitu nelayan yang berasal dari daerah luar.

Pada kasus di Balikpapan ini, konflik antara sesama nelayan lokal pernah terjadi antara nelayan *pejala*⁴ dengan nelayan pebagan perahu dan antara nelayan pancing dengan nelayan pembom. Konflik ini dipicu oleh persoalan cara penangkapan kelompok yang satu yang dirasakan mengganggu hasil tangkapan kelompok yang lain. Sementara itu, konflik antara nelayan lokal dengan nelayan dari luar terjadi antara gabungan nelayan lokal yang menggunakan label “nelayan tradisional” dengan “nelayan modern” dari Jawa Tengah. Nelayan lokal menyebut para nelayan dari Jawa Tengah yang menggunakan alat tangkap *purse seine* tersebut sebagai “nelayan modern” karena memang perangkat penangkapan yang mereka gunakan jauh lebih canggih. Dari ukuran kapal misalnya, kapal yang digunakan oleh para nelayan dari Jawa tersebut di atas 100 gross ton (GT), jauh lebih besar dibanding dengan kapal para nelayan setempat. Konflik antara nelayan lokal dengan nelayan *purse seine* dari Jawa Tengah ini sudah termasuk konflik kekerasan (*violent conflict*); yaitu berupa pembakaran satu kapal nelayan *purse seine* tersebut dan juga pemukulan terhadap wakil nakhodanya. Konflik ini pecah akibat nelayan modern dari Jawa tersebut melakukan penangkapan di wilayah yang terlalu dekat dengan wilayah tangkap (*fishing ground*) nelayan Balikpapan. Akibatnya hasil tangkapan nelayan lokal berkurang drastis.

Konflik internal sesama nelayan yang berbeda jenis alat tangkap seperti ini juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Di Lamongan Jawa Timur misalnya, pernah terjadi konflik kekerasan antara nelayan yang menggunakan alat tangkap bubu dengan nelayan yang menggunakan *mini trawl* (Setyowati, 2020). Menurut Setyowati (2020) akibat pembiaran oleh pemerintah beroperasinya nelayan *mini trawl* yang cukup lama, maka pada tanggal 2 September 1999 para nelayan “tradisional” di wilayah Paciran, Lamongan mengamuk. Dalam peristiwa itu mereka menghancurkan berbagai fasilitas publik seperti Kantor Camat, Kantor Polisi, Kantor Koramil, dan sebagainya.

Dalam konteks revolusi hijau, Prof. Tjondro memberikan “peringatan” potensi konflik akibat perenggangan kelas sosial. Dikatakan “Menurut teori K. Marx, perenggangan antar kelas akan menyebabkan konflik penguasaan sumberdaya, tetapi dari pengamatan kasus-kasus yang sampai sekarang dapat kami amati, memang konflik masih tertunda” (Tjondronegoro, 2008: 339). Jika di pertanian konflik kelas tersebut masih “tertunda”, maka di nelayan konflik kelas tersebut sudah sering terjadi, seperti kasus yang dikemukakan di atas.

⁴ Nelayan *pejala* adalah sebutan lokal untuk para nelayan yang menggunakan jala sebagai alat menangkap ikan. Di Balikpapan, para nelayan *pejala* ini biasanya juga merupakan pemilik *rumpon*, yaitu alat pengumpul ikan di laut (*fish aggregating device* –FAD).

Selain konflik internal antar sesama nelayan, nelayan di Balikpapan juga pernah mengalami konflik berkepanjangan dengan perusahaan tambang. Salah satunya adalah konflik dengan PT UN, ketika perusahaan tambang tersebut melakukan survei seismik yang menyebabkan beberapa puluh *rumpon*⁵ nelayan dipotong. Konflik juga pernah terjadi antara para nelayan dengan perusahaan tambang yang lain, yaitu PT TS. Konflik terjadi akibat pembangunan dermaga milik perusahaan yang mengakibatkan rusaknya *fishing ground* nelayan dan terganggunya kegiatan penangkapan ikan. Konflik antara komunitas pesisir dan perusahaan tambang juga pernah terjadi di wilayah lain, seperti di daerah Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi. Di wilayah pesisir itu, para nelayan, pengelola wisata maupun petani merasa dirugikan akibat kegiatan pertambangan. Perlawanan pun akhirnya muncul, bahkan terjadi demo anarkis yang dilakukan oleh komunitas lokal pada bulan November 2015, dan menyebabkan tiga orang terluka terkena tembakan (Amalia, 2018). Sebenarnya komunitas pesisir di sekitar Tumpang Pitu ini terbelah dalam menyikapi kegiatan pertambangan tersebut; ada yang pro dan ada yang kontra. Dengan kata lain, ada konflik horizontal juga.

Konflik sosial antara komunitas lokal dengan pihak perusahaan juga terjadi di Pulau Pari, DKI Jakarta. Studi Kinseng et al., (2018) menjelaskan bahwa, sumber konflik di Pulau Pari ini adalah masalah kepemilikan lahan di pulau tersebut. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa sebagian besar (sekitar 90%) tanah di Pulau Pari adalah milik perusahaan. Pihak perusahaan mengaku bahwa mereka sudah membeli tanah tersebut dari warga komunitas Pulau Pari. Pengakuan ini juga dibuktikan dengan sertifikat. Namun sebagian warga komunitas lokal menolak klaim perusahaan tersebut. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa mereka adalah pemilik tanah di Pulau Pari; tanah tersebut tidak pernah dijual secara resmi kepada perusahaan. Kalaupun ada proses jual-beli antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan, itu dianggap tidak sah atau ilegal. Dalam kasus konflik ini, sudah ada warga Pulau Pari yang diajukan ke pengadilan dan diputuskan bersalah karena melakukan pembangunan rumah di tanah milik perusahaan. Sama seperti kasus di Tumpang Pitu, Banyuwangi, di sini pun komunitas terbelah dua, ada juga yang mengakui keabsahan pemilikan tanah oleh pihak perusahaan.

Di dalam studi tentang gerakan sosial nelayan yang dilakukan oleh Kinseng dan tim dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dibahas adanya konflik sosial yang terjadi antara nelayan dengan pihak pemerintah. Konflik ini dipicu oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang melarang penggunaan alat tangkap *cantrang*. Melalui Peraturan Menteri atau Permen KP No.2 Tahun 2015 Menteri Susi melarang penggunaan alat tangkap *cantrang*, karena dianggap merusak lingkungan, khususnya sumberdaya perikanan dan kelautan. Hal ini dirasakan sangat merugikan oleh para nelayan di Jawa yang menggunakan alat tangkap *cantrang*. Oleh sebab itu, sejak tahun 2015 itu para nelayan *cantrang* melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran ke Istana Negara di Jakarta pada tahun 2018. Nasution et al., (2019) menjelaskan peranan dan partisipasi para nelayan Juwana, Jawa Tengah, dalam menggerakkan demonstrasi menentang kebijakan pelarangan *cantrang* tersebut.

Di Sumatera Barat juga terjadi konflik antara para nelayan dengan pemerintah. Para nelayan di sini memprotes peraturan yang dikeluarkan pemerintah, yakni larangan penggunaan bagan. Larangan penggunaan bagan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri KP No. 42 tahun 2014. Selain itu, para nelayan juga protes atas Peraturan Menteri KP No.71 tahun 2016 tentang alat tangkap dan penggunaan lampu. Dalam Permen No. 71/2016 ini, pemerintah melarang penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring 4 mm dan lampu pada bagan yang berkekuatan 25.000 hingga 30.000 Watt. Kemarahan para nelayan akhirnya memuncak ketika aparat keamanan menangkap enam kapal nelayan pada tanggal 11 Juni 2016. Oleh sebab itu, pada tanggal 25 Juni 2016 sekitar 5.000 orang nelayan mengadakan demonstrasi menuntut dibolehkannya penggunaan bagan di Sumatera Barat (Hapsari et al., 2020). Mereka berdemo di depan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, Kantor Gubernur, dan Kantor DPRD Sumatera Barat.

⁵Rumpon adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan (*fish aggregating device* –FAD) di laut agar bisa mendapatkan ikan lebih mudah dan banyak. Di Balikpapan, rumpon terbuat dari daun kelapa, yang diikat dan diletakkan di dalam laut. Daun-daun kelapa ini diberi pemberat agar tidak hanyut. Rumpon dimiliki oleh nelayan secara perorangan.

Selanjutnya, studi Kinseng dan tim tahun 2018-2019 ini juga mengkaji konflik antara nelayan dengan pemerintah (dan perusahaan) sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan di Teluk Benoa, Bali. Pada kedua kasus reklamasi ini, para nelayan dan komunitas pesisir di kedua wilayah tersebut melakukan perlawanan dengan berbagai cara, termasuk melakukan demonstrasi. Konflik antara para nelayan dengan pihak pemerintah setempat dan perusahaan di Teluk Banten, Jawa Barat, juga terkait dengan kebijakan reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan kebijakan pemerintah setempat terkait pemberian ijin penambangan pasir (Alkhudri et al., 2018; Muldi et al., 2019). Sementara itu, peraturan pemerintah mengenai zonasi di perairan Taman Nasional Bali Barat juga memicu konflik sosial antara nelayan dengan pihak pengelola Taman Nasional Bali Barat (Mahmud et al., 2016). Peraturan tersebut juga memicu konflik antara pihak nelayan dengan perusahaan wisata.

Pemahaman tentang konflik sosial dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek atau dimensi dari konflik sosial tersebut, seperti aktor yang terlibat, relasi antar berbagai aktor tersebut, kekuasaan, isu atau penyebab konflik, proses konflik itu sendiri, pengelolaan dan resolusi konflik, dampak konflik, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, jika dilihat dari isunya, dari beberapa kasus konflik pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikemukakan dalam tulisan ini, pada dasarnya semuanya menyangkut isu akses dan kontrol atas sumberdaya alam sebagai sumber *livelihood* para nelayan. Ini sejalan dengan yang dikatakan Kinseng (2020b) bahwa “Apapun pemicu konflik di permukaan, pada tataran yang paling dalam konflik itu berkaitan dengan tiga isu fundamental, yaitu: sumber penghidupan (*livelihood*), keadilan sosial (*justice*), dan martabat manusia (*dignity*)”. Dalam hal ini ada yang langsung menyangkut akses atas sumberdaya alam, misalnya konflik antar sesama nelayan yang memperebutkan wilayah tangkap maupun sumberdaya ikan, konflik antara nelayan dengan pemerintah dan pengusaha dalam kasus reklamasi pantai, juga antara nelayan dengan perusahaan tambang (dan pemerintah). Sementara itu, konflik antara nelayan dengan pemerintah akibat kebijakan seperti larangan penggunaan *cantrang*, bersifat tidak langsung pada akses, tetapi ujungnya tetap soal akses nelayan atas sumberdaya alam. Dalam kasus larangan penggunaan *cantrang* dan bagan misalnya, para nelayan melakukan perlawanan karena larangan tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mengakses sumberdaya alam seperti biasanya. Padahal, itu adalah sumber *livelihood* mereka; dan kalau sudah menyangkut *livelihood* atau “masalah perut” istilah para nelayan di Balikpapan, maka konflik itu cenderung bersifat *violent* atau melibatkan kekerasan (Kinseng, 2014).

Dalam hal keterkaitan antara konflik dan perubahan sosial, kasus-kasus yang dibahas dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial secara langsung atau tidak langsung justru berperan sebagai penyebab konflik sosial; bukan sebagai hasil dari konflik sosial seperti yang dikemukakan oleh Marx dan Dahrendorf misalnya. Contoh yang tidak langsung adalah modernisasi perangkat teknologi penangkapan yang menyebabkan munculnya kelas atau stratifikasi sosial, yang kemudian menyebabkan adanya konflik kelas maupun konflik antar kelompok nelayan berbasis jenis alat tangkap yang dikenal dengan istilah “*gear wars*” (Adrianto et al., 2007). Perlu dijelaskan bahwa konsep kelas di kalangan nelayan ini lebih luas dari konsep kelas Marxist ortodoks, di mana dimensi “besarnya kepemilikan alat produksi” juga menentukan kelas. Berdasarkan konsep kelas itu, maka Kinseng (2014) menyebutkan bahwa struktur kelas nelayan di Balikpapan adalah “struktur empat kelas”, yakni buruh nelayan, nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar. Konflik sosial justru lebih sering terjadi antara kelas nelayan kecil/menengah dengan kelas nelayan besar, bukan antara pemilik dan buruh nelayan.

KESIMPULAN

Sebagai *tribute* untuk Prof. Tjondro, tulisan ini pertama-tama menunjukkan bahwa Prof. Tjondro mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan kajian perubahan sosial di pedesaan di Indonesia. Sumbangan tersebut berada di dua ranah, yakni ranah pendidikan di Perguruan Tinggi dan ranah riset empiris. Pada ranah pendidikan di Perguruan Tinggi, Prof. Tjondro berjasa melalui perannya sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Perubahan Sosial di Program Studi Sosiologi Pedesaan (Prodi SPD)

Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Sementara itu, pada ranah riset, Prof. Tjondro berjasa melalui riset-riset dan publikasi ilmiah yang membahas perubahan sosial di pedesaan di Indonesia. Salah satu karya Prof. Tjondro itu adalah disertasinya yang berjudul “*Social Organization and Planned Development in Rural Java*”, yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1984. Dalam buku inilah Prof. Tjondro mengemukakan pemikiran bernas beliau tentang sodality, yang kemudian diabadikan sebagai nama jurnal sosiologi pedesaan ini. Prof. Tjondronegoro menggunakan konsep sodality ini untuk menjelaskan kolektivitas sosial di pedesaan Jawa yang masih relatif stabil di tengah-tengah proses perubahan sosial. “*In the continuing process of disintegration of the village community, the relatively viable social collectivities have come to be the sodalities...*”, kata Prof. Tjondronegoro.

Selanjutnya, tulisan ini menunjukkan bahwa komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil itu merupakan komunitas yang dinamis, yang telah mengalami perubahan-perubahan sosial cukup fundamental, baik pada struktur sosial distribusional vertikal maupun horizontal. Perubahan struktur sosial distribusional vertikal ditandai dengan munculnya pelapisan sosial yang semakin rumit, baik di internal nelayan dalam satu unit penangkapan ikan (perahu/kapal), maupun di level komunitas nelayan. Dalam hal ini, fenomena “bertambahnya lapisan sosial” dan polarisasi komunitas desa akibat masuknya teknologi pertanian yang dikemukakan oleh Prof. Tjondro pada dasarnya terjadi juga pada komunitas nelayan. Jadi, baik di kalangan petani maupun nelayan, telah terjadi “*technological divide*” hingga “*technological inequality*”. Sementara itu, perubahan struktur sosial distribusional secara horizontal antara lain ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok nelayan berbasis jenis alat tangkap yang baru. Selanjutnya, struktur sosial normatif/institusional seperti *Sasi* juga dinamis dan mengalami perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi aturan-aturannya, maupun pemegang otoritasnya.

Dalam kaitan dengan konsep sodality, maka pada komunitas nelayan, yang menonjol adalah sodality berbasis jenis alat tangkap, bukan berbasis teritorial seperti dukuh (*hamlet*) dan kampung (RK) seperti yang dikemukakan oleh Prof. Tjondro. Selanjutnya, walaupun penyebutan kelompok berbasis alat tangkap itu sudah lama ada, namun belakangan ini sodality para nelayan ini semakin menguat dan lebih formal serta memiliki kesadaran kelompok yang cukup kuat, khususnya ketika ada “musuh bersama”. Yang paling menonjol tentunya adalah kelompok nelayan *cantrang* yang melakukan demonstrasi besar-besaran menentang pelarangan *cantrang* (lihat Nasution et al. 2019, misalnya).

Dari segi sumber perubahan sosial, ada beragam fenomena yang menyebabkan perubahan sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Yang termasuk ke dalam perspektif materialistik utamanya adalah teknologi. Di kalangan komunitas nelayan, perangkat teknologi penangkapan menjadi sumber perubahan sosial yang sangat dominan dan penting. Kasus-kasus yang dibahas dalam tulisan ini menunjukkan bahwa sumber perubahan struktur sosial distribusional vertikal maupun horizontal yang mendasar pada komunitas nelayan umumnya adalah perangkat teknologi penangkapan ini. Dengan kata lain, perubahan moda produksi (*mode of production*) menyebabkan perubahan sosial yang mendasar di kalangan para nelayan. Selain itu, masuknya pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan pariwisata juga termasuk perspektif materialistik. Sementara itu, sumber perubahan sosial yang lain adalah orientasi nilai budaya dalam proses produksi yang semakin mementingkan ekonomi (lebih komersial); ini termasuk perspektif idealistik.

Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak sepi dari konflik sosial. Di kalangan para nelayan, misalnya, konflik sosial sering terjadi baik antara sesama nelayan maupun antara nelayan dengan pihak non-nelayan. Dalam konflik-konflik sosial yang terjadi di komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini, isu utama yang memicu konflik sosial adalah terganggunya akses kelompok nelayan tertentu atau pun seluruh komunitas terhadap sumberdaya alam yang menjadi sumber *livelihood* mereka. Terganggunya akses itu bisa karena perbedaan teknologi penangkapan, karena kebijakan pemerintah, maupun masuknya perusahaan ke dalam komunitas itu.

Selanjutnya, dari segi hubungan antara perubahan sosial dan konflik sosial, kasus-kasus yang dibahas dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial itu menjadi suatu faktor penting yang memicu konflik sosial, bukan sebaliknya. Konflik sosial di antara sesama nelayan misalnya, muncul karena ada perubahan struktur sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara itu, konflik antara nelayan dengan pemerintah terjadi karena ada perubahan kebijakan oleh pemerintah (perubahan struktur sosial normatif/institusional); sedangkan konflik antara nelayan/masyarakat pesisir dengan perusahaan dipicu oleh perubahan struktur sosial akibat kehadiran perusahaan tersebut. Jadi, dalam

kasus-kasus ini, perubahan sosial itu bukan disebabkan karena terjadinya konflik sosial, tetapi sebaliknya menciptakan kondisi yang menyebabkan konflik sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pengelola *Jurnal Sodality* yang mendorong penulis untuk turut berpartisipasi dalam penulisan artikel sebagai *tribute* kepada guru kita almarhum Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro ini. Terima kasih juga kepada para mahasiswa bimbingan penulis yang telah melakukan penelitian sehingga memungkinkan penulis membuat artikel ini. Semoga sukses semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L., Kinseng, R. A., Andalita, V., & Solihin, A. (2007). Study on Collection and Analyzing Fisheries Conflicts Case in Indonesia. *Japan International Cooperation Agency, 2007*.
- Alkhudri, A. T., Dharmawan, A. H., & Kinseng, R. A. (2018). Genealogy and Effectiveness of Fishermen Movements In North Banten – Indonesia. *International Journal of Research in Social Sciences, 25*(1), 11–18.
- Amalia, T. R. (2018). *Analisis Perubahan Sosial Budaya Masyarakat (Kasus: Pengembangan Wisata Pulau Merah, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)*. IPB University.
- Anwar, S. J., Kolopaking, L. M., Kinseng, R. A., & Hubeis, A. V. S. (2014). The Impact of State Intervention on Social Capital of Fishermen Community in Small Islands. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture, 6*(2), 246–259. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i2.3304>
- Babbie, E. (2016). *The Practice of Social Research*. Cengage Learning.
- Berberoglu, B. (2019). *The Palgrave Handbook of Social Movements, Revolution, and Social Transformation*. Palgrave MacMillan.
- Bertens, K. (2018). *Sejarah Filsafat Yunani*. PT Kanisius.
- Blau, P. M. (1977). A Macrosociological Theory of Social Structure. *American Journal of Sociology, 83*(1). <https://doi.org/10.1086/226505>
- Buscher, B., Bavinck, M., & Fletcher, R. (2020). *Planning for Post-Corona: Five proposals to craft a radically more sustainable and equal world*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19466.62408>
- Dahrendorf, R. (1963). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Dahrendorf, R. (1973). Toward a Theory of Social Conflict dalam Etzioni, A and Eva Etzioni-Halevy. In E. Etzioni-Halevy (Ed.), *Social Change. Sources, Patterns, and Consequences*. Basic Book, Inc., Publishers.
- Hakim, L. (2015). *Pertambangan, Dinamika Struktur Kelas dan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan. Studi Kasus Masyarakat Desa Sarakaman, Pulau Sebuk, Kotabaru, Kalimantan Selatan*. IPB University.
- Hanafi, S. (2020). Post-COVID-19 Sociology. *ISA Digital Platform, Burris, 1–8*. [https://isociologia.up.pt/sites/default/files/eventos/Post-COVID-19 Sociology.pdf](https://isociologia.up.pt/sites/default/files/eventos/Post-COVID-19%20Sociology.pdf)
- Hapsari, D. R., Kinseng, R. A., Sarwoprasodjo, S., Simanjuntak, A. P., Anam, K., Sarifuddin, A., & Sulistiyowati, I. (2020). Fishermen Social Movements in West Sumatra: Issues, Actors, and

Tactics of the Movement. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(01), 14–29.

- Harper, C. L. (1989). *Exploring Social Change*. Prentice Hall.
- Kamilah, F. (2019). *Stok Modal Sosial dan Tingkat Partisipasi dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Kasus: Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta)*. IPB University.
- Kinseng, R. A. (2014). *Konflik Nelayan*. Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
- Kinseng, R. A. (2017a). Decentralisation and the Living Conditions and Struggle of Fishers: A Study in West Java and East Kalimantan. *Journal of Sustainable Development*, 10(2), 71–82. <https://doi.org/10.5539/jsd.v10n2p71>
- Kinseng, R. A. (2017b). Structugency: A Theory of Action. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 127–137.
- Kinseng, R. A. (2020). *The Old and the New Normal (Bahan presentasi pada diskusi Ekbudbang)*.
- Kinseng, R. A., Nasdian, F. T., Fatchiya, A., Mahmud, A., & Stanford, R. J. (2018). Marine-tourism development on a small island in Indonesia: blessing or curse? *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(11), 1062–1072. <https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1515781>
- Lauer, R. H. (2001). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta.
- Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2015). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3), 237–251. <https://doi.org/10.22146/jsp.13141>
- Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2016). Territorialization and Fisher's Conflict at The National Parks of West Bali. *Sosek KP*, 11(1), 45–54.
- Mendoza-González, G., Martínez, M. L., Guevara, R., Pérez-Maqueo, O., Garza-Lagler, M. C., & Howard, A. (2018). Towards a sustainable sun, sea, and sand tourism: The value of ocean view and proximity to the coast. *Sustainability (Switzerland)*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/su10041012>
- Mony, A. (2015). *Ekologi Politik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Studi Kasus Relasi Kuasa Pengelolaan Sasi Laut di Pulau Haruku*. IPB University.
- Mouzelis, N. P. (2008). *Modern and Postmodern Social Theorizing. Bridging the Divide*. Cambridge University Press.
- Muldi, A., Sumardjo, Kinseng, R. A., & Sugihen, B. G. (2019). The Role of Communication In Resources and Environmental Conflicts In Coastal Communities of Banten Bay. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 8(92). <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-08.22>
- Nasution, C. N., Kinseng, R. A., & Adiwibowo, S. (2019). Analysis of Strategies and Success Factors Jurnal Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(1), 62–80. <https://doi.org/10.14710/jis.18.1.2019.62>
- Patriana, R. (2017). *Dinamika Sasi di Kaimana: Perubahan Kelembagaan dama Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional*. IPB University.
- Pratama, Y. E., & Kinseng, R. A. (2015). Impact of Tourism Development and Fisherman Attitudes in Pangandaran Village. *Jurnal Penyuluhan*, 9(1).
- Salgues, B. (2018). *Society 5.0. Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools*. ISTE, WILEY.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Schwab. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Setyowati, I. S. (2020). *Dinamika Struktur Sosial Nelayan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus: Komunitas Nelayan Di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)*. IPB University.
- Singer, P. (1980). *MARX*. Oxford University Press.
- Situmeang, W. H., A Kinseng, R., & P Lubis, D. (2020). Technological Development and The Dynamics of Juwana's Fisherman Social Structure. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 36–52. <https://doi.org/10.22500/8202030889>
- Situmeang, W. H., Nasution, C. N., Seminar, A. U., & Kinseng, R. A. (2019). Roles of fisher folk social organization in Pati Regency. In R. A. Kinseng, A. H. Dharmawan, D. P. Lubis, & A. U. Seminar (Eds.), *Proceedings of the International Conference On Rural Socio-Economic Transformation: Agrarian, Ecology, Communication And Community Development Perspectives (RUSET 2018)*. Taylor & Francis.
- Skocpol, T. (1989). *What Makes Peasant Revolutionary?*” In Robert P. Weller and Scott E. Guggenheim, 1989. *Power and Protest in the Countryside: Studies of Rural Unrest in Asia, Europe, and Latin America*. Duke University Press.
- Skocpol, T. (1994). *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge University Press.
- Syahdin. (2013). *Perubahan Moda Produksi dan Potensi Konflik pada Kalangan Nelayan (Studi Kasus pada Nelayan Bugis Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)*. IPB University.
- Tjondronegoro, S. (1984). *Social Organization and Planned Development in Rural Java*. Oxford University Press.
- Tjondronegoro, S. (2008). *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan* (S. Adiwibowo, L. M. Kolopaking, N. K. Pandjaitan, & M. A. Sunito (eds.)). Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Turner, J. H. (1998). *The Structure of Sociological Theory (Sixth Edition)*. Belmont, CA, USA.
- Vago, S. (1989). *Social Change*. Prentice Hall.
- Wallace, R. A., & Wolf, A. (2006). *Contemporary Sociological Theory Expanding the Classical Tradition (Sixth Edition)*. Prentice Hall.
- Weber, M. (1992). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge.
- Zizek, S. (2020). *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*. OR Books.